

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Hasan dan Azis (2018), problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada di dalamnya, sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Permasalahan dari pembangunan suatu daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan sebuah nilai unik (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam pada suatu daerah. Dengan informasi ini mengarahkan kita bagaimana mengambil keputusan yang berasal dari daerah tersebut untuk membangun kesempatan kerja baru serta bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah yaitu proses mencakup pembentukan institusi baru dan perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik, upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu daerah menjadi lebih dari

sebelumnya melalui perbaikan kapasitas dari sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber secara bertanggung jawab.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja untuk masyarakat yang ada di daerah untuk mengurangi pengangguran yang ada. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif untuk membangun pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya bisa memanfaatkan potensi atau sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran yang ada di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana kemajuan dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan juga dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami mengalami pertumbuhan negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Desentralisasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan DBH, DAU, dan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan DBH, DAU, dan PAD tersebut harus berdampak Pertumbuhan Ekonomi daerah itu sendiri, namun daerah tidak akan berhasil apabila daerah itu sendiri tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi meskipun terjadi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan PAD. Keberhasilan Dana Bagi Hasil, DAU, dan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Hasan dan Azis (2018), bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari proses pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) maupun syarat kecukupan (*sufficient condition*) dalam mengurangi kemiskinan. Untuk dapat tumbuh secara cepat, daerah perlu memilih satu atau lebih pusat- pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan konsep yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan *output* dalam jangka panjang serta penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi

satu sama lain. Menurut Hasan dan Azis (2018), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Dana Bagi Hasi (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan daerah yang didapatkan dari sumber DBH, DAU, dan PAD maka semakin besarnya pula pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur suatu daerah diukur menggunakan GDP setiap tahunnya. Semakin besar nilai GDP maka semakin tinggi pertumbuhannya, begitupula sebaliknya semakin rendah nilai GDP maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi DBH, DAU, dan PAD suatu daerah, maka menunjukkan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi keuangan/ekonomi daerah yang ditandainya dengan meningkatnya sektor pembangunan dan lainnya pada suatu

daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi diperoleh laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010-2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Ekonomi, DBH, DAU, dan PAD Provinsi Jambi
Tahun 2010-2020

Tahun	PE (%)	DBH (Rp)	DAU (Rp)	PAD (Rp)
2010	7,35	423.432.188.790	488.774.347.100	1.640.185.857.679
2011	7,86	113.382.633.617	583.882.413.000	2.078.906.913.790
2012	7,03	576.140.512.809	731.952.242.000	2.662.697.133.695
2013	6,84	599.946.011.316	836.578.062.000	2.886.193.262.876
2014	7,36	516.992.008.000	948.337.712.000	3.165.055.792.535
2015	4,21	352.133.364.000	1.009.165.864.000	3.129.704.823.876
2016	4,37	395.791.297.693	1.070.452.478.000	3.210.618.192.919
2017	4,60	390.520.754.714	1.397.912.161.000	4.311.792.610.111
2018	4,69	276.744.954.400	1.399.367.134.000	4.218.022.336.000
2019	4,37	387.007.236.000	1.433.203.410.000	1.651.089.944.000
2020	-0,46	365.717.898.500	1.444.166.395.000	1.665.325.703.000
Jumlah	58,22	4.397.808.859.839	11.343.792.218.100	30.619.592.570.481
Rata	5,29	399.800.805.440	1.031.253838.009	2.783.599.324.589,18

Sumber: Data BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa fenomena pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis sebesar -0,46%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,36% . Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Periode tahun 2010-2020 adalah sebesar 5,29%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang meningkat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mampu mengelola potensi wilayah yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang menurun disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi nasional akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa fenomena pertumbuhan Dana Bagi Hasil Provinsi Jambi dari tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2010 nilai DBH Provinsi Jambi sebesar Rp. 423.432.188.790 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 113.382.633.617. Sedangkan pertumbuhan Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2012 sebesar Rp. 576.140.512.809. Rata-rata pertumbuhan Dana Bagi Hasil Provinsi Jambi Periode tahun 2010-2020 adalah sebesar Rp.399.800.805.440. Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Provinsi Jambi yang meningkat menunjukkan bahwa provinsi Jambi kegiatan ekonomi swasta dan SDA mengalami perkembangan yang optimal.

Berdasarkan tabel di atas fenomena Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi pada tahun 2010-2020 selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.397.912.161.000. Sedangkan pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.399.367.134.000. Dari data pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi pada tahun 2010-2020 di atas menunjukkan adanya fenomena peningkatan setiap tahunnya, karena daerah Provinsi Jambi harus membangun daerah setiap tahun yang didanai dari dana perimbangan/pusat.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan fenomena bahwa PAD Provinsi Jambi tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pertumbuhan PAD provinsi Jambi mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.651.089.944.000 atau 60,86%. Sedangkan pertumbuhan PAD Provinsi Jambi

mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.4.311.792.610.111 atau 34,37%. Rata-rata pertumbuhan PAD Provinsi Jambi Periode tahun 2010-2020 adalah sebesar Rp.2.783.599.324.589,18 atau 4,65%. Pertumbuhan PAD Provinsi Jambi yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Provinsi Jambi kondisinya kurang baik, karena beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan penghasilan.

Menurut Irawan dan Sopermoko (2013), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor dalam pendapatan daerah yang dihasilkan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya dana bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Halim (2014), bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan daerah atau sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk daerah tersebut, dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah di Provinsi Jambi. Semakin besar Dana Bagi Hasil yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka

semakin besar pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini didukung hasil penelitian dari Kurniasari (2019), bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah yang mendapatkan transfer DBH yang cukup tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pula. Dana Bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dan merupakan modal pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila dana DBH yang dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah tinggi, maka tentunya pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Nordiawan (2017), Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi. Menurut teori bahwa DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. karena semakin besar kucuran dana DAU dari pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai daerah, sehingga perekonomian daerah dapat meningkat.

Sebagaimana hasil penelitian dari Uhise (2013), Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga bertambahnya dana alokasi umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mardiasmo (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut teori Halim (2014), bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu apabila tingginya PAD yang dihasilkan pada suatu daerah, maka tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana hasil penelitian dari Wahyuni (2020), hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2015-2019, berarti secara langsung menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2010- 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi tahun 2010-2020.
2. Berapa besar pengaruh simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi tahun 2010-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi tahun 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya serta dapat dikembangkan untuk melakukan penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan pihak yang memerlukan, terutama pemerintah provinsi Jambi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Sebagai tambahan referensi dan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya.

